

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT yang mewajibkan umat Islam untuk menggunakan sebagian hartanya sesuai dengan tingkatannya dan memenuhi standar hukum Islam. Selain itu, sumber dan jenis aset menjadi kriteria dalam membayar zakat. Karena kesenjangan antara orang kaya yang memiliki aset kaya tetapi tidak terbiasa membantu orang miskin, seringkali perbedaan kondisi ekonomi menjadi masalah. Oleh karena itu, zakat bertujuan untuk mengatasi kesenjangan tersebut.

Zakat memiliki dua fungsi, pertama, zakat adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat membersihkan harta dan jiwa serta menjaganya dalam keadaan suci. Kedua, zakat adalah dana yang digunakan untuk tujuan sosial dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan guna mewujudkan keadilan sosial. Zakat digunakan untuk ibadah dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk dana sosial guna mengatasi masalah kemiskinan (Alfian Jamil, 2018:246). Sebagaimana firman Allah Swt :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ

وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana*” (*Q. S At – Taubah : 60*)

Tabel 1. 1

Total Penyaluran Zakat Berdasarkan *Ashnaf* 2019

<i>Ashnaf</i>	Jumlah yang disalurkan (Juta)	Persentase (%)
Fakir miskin	3.356.325	69,06
Amil	518.647	10,67
Mualaf	97.156	2,00
Riqob	21.827	0,45
Ghorimin	40.772	0,84
Fi sabilillah	775.062	15,54
Ibnu sabil	70.363	1,45
Total	4.860.155	100

Sumber : Outlook Zakat Indonesia 2019

Berdasarkan *outlook zakat Indonesia 2019* pada tabel 1. Pada tahun 2019 sebagian zakat dialokasikan untuk fakir miskin sekitar 3 triliun atau 69.06 persen dari total dana zakat. Fakir miskin merupakan kelompok dengan penerima zakat paling tinggi yang dialokasikan di atas 50 persen. Dana zakat disalurkan pada beberapa bidang, yakni ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dakwah. Bidang sosial menjadi paling tinggi dengan persentase 25,89%.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang menjadi isu global di setiap negara. Kemiskinan dapat diartikan lemahnya kemampuan penduduk suatu negara dalam mencukupi pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan serta adanya ketimpangan sosial dan pendapatan. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* atau disebut COVID-19 merebak akhir tahun 2019 lalu, dilihat dari penyebarannya, per tanggal 02 Agustus 2020, sudah terdapat 215 negara yang positif terkena COVID-19 (Worldometer, 2020). Sementara itu di Indonesia pasien pertama dan kedua COVID-19 telah diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Maret 2019 oleh Presiden Joko Widodo bersama Menteri Kesehatan Terawan. Masuknya COVID-19 mengakibatkan Indonesia adalah negara ke-24 yang menjadi penderita COVID-19 dengan jumlah kasus per 02 Agustus 2020 sebanyak 109.936 (Worldometer, 2020).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai kebijakan dalam mengantisipasi COVID-19, salah satunya adalah pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pembatasan menurut World Bank (2020) menyebabkan adanya kejutan (*shock*) baik dari sisi permintaan dan penawaran secara global akibat aktivitas yang dibatasi. Tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2020 mencapai 2,97% (BPS,2020). Hal tersebut jauh dari proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah berkisar 5-6 %.

Tabel 1. 2
Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

	Prediksi 2020			Prediksi 2021		
	2019	IMF	ABD	WB	IMF	ABD
	Baseline					
Indonesia	5%	0,5%	2,5%	2,1%	8,2%	5%

Sumber: *IMF Outlook* (2020), *Asian Development Outlook* (2020), *World Bank* (2020).

Proyeksi tersebut dapat terjadi mengingat peran UMKM di Indonesia sebagai penyelamat perekonomian saat terjadi krisis 1998-1999 dan 2008-2009 yang saat ini terpaksa tidak bisa berusaha seperti biasa sehingga jika diasumsikan pertumbuhan ekonomi di bawah 4,2% berpotensi mengakibatkan kerugian UMKM mencapai Rp 1.594 triliun atau Rp 47,9 juta pertahun atau Rp 2 juta perbulan bagi pekerjanya (Puskas BAZNAS, 2020). Sedangkan tingkat pengangguran di Indonesia, diprediksi bakal meningkat dari 5,28% menjadi 7,5% ditahun 2020 (*IMF Outlook*, 2020). Kedua hal tersebut dapat menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat di Indonesia. Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan masih dibawah masih sebesar 25 juta jiwa atau 9.4 % dari penduduk Indonesia (BPS, 2019) dan diekspektasikan akan terus bertambah dikarenakan kasus COVID-19.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang ikut terdampak dengan adanya kasus COVID -19, sektor pariwisata dan pelaku UMKM menjadi sektor yang terdampak paling besar

(jogja.tribunnews.com, 2020). D.I Yogyakarta memiliki empat kabupaten yaitu Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo, dan satu Kota Yogyakarta. Tingkat kemiskinan Kulon Progo menjadi paling tinggi sebesar 17,39 persen (bappeda.jogjaprovo.go.id, 2020). Jumlah penduduk miskin di Kulon Progo dilihat tabel 1.3.

Tabel 1. 3
Garis Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Kulon Progo
2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)
2015	273.436	88,13
2016	297.353	84,34
2017	312.403	84,17
2018	323.105	77,72
2019	333.781	74,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kulon Progo 2020

Berdasarkan Tabel 1, garis kemiskinan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Garis kemiskinan pada tahun 2019 sebesar Rp333.781 per orang per bulan yang berarti besarnya pengeluaran makanan dan non makanan penduduk Kulon progo, sehingga penduduk yang memiliki rata-

rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Berdasarkan berita yang dirilis oleh harianjogja.com pada 14 Januari 2020, angka kemiskinan Kulon Progo di Yogyakarta masih paling tinggi sebesar 17,39 persen. Sedangkan, penurunan angka kemiskinan hanya 1 persen padahal setiap tahunnya harus turun 3 persen untuk memenuhi target.

Kemiskinan sering dikaitkan dengan desa. Desa menjadi wilayah yang sering dikaitkan dengan tempat tertinggal, miskin dan lain sebagainya. Di Yogyakarta terdapat 304,66 ribu orang miskin lebih di perkotaan, yang mana dua kali lipat penduduk miskin di perdesaan yang hanya 143,81 ribu orang. Namun, secara persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak sebesar 13.89 persen dibandingkan jumlah penduduk di perkotaan yang hanya 10.89 persen (BPS, 2020). Oleh karena itu, dalam hal ini ketersediaan data dan pengukuran sangat diperlukan, terutama dalam merumuskan intervensi kebijakan yang dapat menyelesaikan permasalahan dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Kementerian Desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menargetkan dapat menurunkan jumlah 10.000 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan meningkatkan jumlah 5.000 desa berkembang menjadi desa mandiri tahun 2024.

Pembangunan perdesaan merupakan upaya pembangunan nasional karena angka kemiskinan penduduk perdesaan 6,16 persen lebih tinggi dari angka kemiskinan perkotaan (BPS, 2019).

Desa mempunyai peran yang besar dalam upaya menentukan visi yang dicapai melalui pembangunan desa (UU Desa, 2014).

Dari beberapa fakta tersebut menunjukkan perlu alat khusus yang dapat mengungkap secara utuh permasalahan desa dari segi material, spiritual dan moral, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah solusi yang tepat untuk mempercepat pembangunan pengentasan kemiskinan.

Menanggapi hal tersebut, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang dalam kegiatannya ikut andil guna mengatasi kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia dengan melaksanakan program *Zakat Community Development (ZCD)* yang bertujuan untuk memperdayakan masyarakat dengan menyasar komunitas mustahik di desa – desa yang tertinggal kesejahteraannya maupun sarana dan prasarananya.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) DIY yang berkerjasama dengan BAZNAS Kulon Progo pada tahun 2019 telah menyalurkan bantuan program ZCD sebesar 1.492.540.000 untuk budidaya 10.000 itik petelur untuk 100 warga masing – masing warga mendapat 100 ekor di wilayah kecamatan panjatan. Program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan serta memperbaiki gizi keluarga. Sebelumnya, BAZNAS pusat melakukan survei di desa – desa kecamatan Panjatan guna mengetahui sejauh mana proposal yang diajukan oleh BAZNAS Kulon Progo dalam program ZCD sesuai sasaran atau belum (baznas.kulonprogokab.go.id, 2017). Sementara dalam upaya penanganan COVID-19, lembaga program ZCD membentuk

Desa Tanggap Bencana Corona secara bertahap diterapkan di 107 desa yang menjadi titik implementasi program ZCD dan sudah terlaksana di 67 desa, 53 kecamatan, 45 kabupaten, 22 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Di Yogyakarta ada 13 desa yang telah menjadi Desa Tanggap Bencana Corona. Terdapat 11 desa di Kecamatan Panjatan yang di tahun 2019 menjadi titik program ZCD BAZNAS, Desa Wonokerto, Sleman dan Desa Srimartani, Bantul (Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi COVID-19, 2020).

Penentuan kelayakan status desa menerima zakat dari program *zakat community development* (ZCD), desa memiliki alat ukur khusus yaitu indeks desa zakat (IDZ). Indeks Desa Zakat adalah alat yang digunakan untuk mengukur status desa layak atau tidak layak didukung BAZNAS melalui pendanaan zakat. Indeks Desa Zakat juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memantau dan mengevaluasi proses pengelolaan zakat di desa tersebut, untuk kemudian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan dana zakat. Dengan indeks desa zakat, maka diperoleh data yang lebih akurat yang dapat digunakan untuk menentukan rencana program produktif yang tepat bagi komunitas mustahik dan mendapatkan data evaluasi dari rencana tersebut. Indeks tersebut dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemberdayaan atau rencana pembangunan yang dilaksanakan di desa tersebut. Oleh karena itu, indeks ini dapat mencakup dimensi dan variabel yang tepat untuk mengukur perkembangan desa secara komprehensif (Alfan Jamil, 2018:247).

Desa Demangrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Sentolo, Kulon Progo. Berdasarkan perhitungan Indeks Desa Membangun 2019 Desa Demangrejo berstatus desa berkembang dengan nilai 0.6910 (kemendesa.go.id, 2019). Keputusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Desa berkembang yaitu :

Desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

Mayoritas penduduk Desa Demangrejo adalah buruh tani dan petani. Jumlah penduduk Desa Demangrejo 3.400 jiwa. Desa Demangrejo merupakan sentral penghasil bawang merah yang ada di Kulon Progo. Namun, masa panen untuk komoditas bawang merah hanya ada di bulan Agustus untuk persiapan bibit sampai bulan November untuk panen dan selain bulan itu mereka menanam padi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rubiyono menyatakan bahwa penerimaan bantuan pemerintah pada tahun 2019 untuk masyarakat miskin di Desa Demangrejo hampir 80 persen dari total kepala keluarga (KK) yang ada, terhitung terdapat 946 kepala keluarga yang ada di Desa Demangrejo dan yang mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk beras raskin, bantuan sosial, program keluarga harapan (PKH) sebanyak 700 kepala keluarga (wawancara dengan sekretaris desa, 27 Maret 2020: 09.45). Artinya, kemiskinan di Desa Demangrejo masih cukup tinggi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Samiran menyatakan bahwa rata-rata penghasilan masyarakat Desa Demangrejo sebesar 1.000.000 – 1.500.000 yang mana penghasilan tersebut masih di bawah UMR Kulon Progo yang sebesar 1.750.000, kondisi ini dikarenakan sebagian besar masyarakat masih menjadi buruh tani dan kurangnya fasilitas umum (wawancara dengan bagian kamituo/ kemasyarakatan, 27 Maret 2020:10.30). Melihat kondisi yang terjadi di desa tersebut diperlukan program bantuan untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami.

Dengan adanya program *zakat community development* yang dikeluarkan BAZNAS diharapkan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin dan ketimpangan di Desa Demangrejo melalui pemberdayaan berbasis komunitas dengan dana zakat. Namun yang menjadi kendala adalah dalam penyaluran zakat dibutuhkan proses penilaian layak atau tidak desa tersebut menerima bantuan zakat dan jika layak bentuk program pemberdayaan yang sesuai untuk diterapkan. Oleh karena itu, adanya IDZ akan membantu BAZNAS untuk menyalurkan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya. Output yang dihitung oleh IDZ adalah nilai indeks desa yang menjadi prioritas pendampingan dan rencana pemberdayaan yang tepat untuk dilaksanakan. Tahap selanjutnya para amilin BAZNAS dapat memonitoring dan mengevaluasi rencana zakat yang diterapkan di desa tersebut. Hal ini dilakukan agar rencana zakat yang diimplementasikan menjadi tepat dan berdampak lebih efektif

terhadap peningkatan taraf hidup mustahik di suatu daerah (khususnya pedesaan) (Fitriyani, 2019:6).

Mengingat rencana pengukuran IDZ yang dilakukan BAZNAS 2018- 2020 sebanyak 161 desa dan baru tercapai 136 desa dalam target rencana strategis BAZNAS 2020, sehingga pengukuran IDZ desa Demangrejo menjadi upaya untuk mencapai target rencana strategis tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT DALAM Mendukung ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT DI DESA DEMANGREJO, KECAMATAN SENTOLO, KABUPATEN KULON PROGO”**

B. Rumusan Masalah .

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat permasalahan penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah implementasi Indeks Desa Zakat dalam mendukung *Zakat Community Development* di desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian di atas bertujuan untuk:

- Mengetahui implementasi Indeks Desa Zakat dalam mendukung *Zakat Community Development* di Desa Demangrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait penyaluran zakat untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan..
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana Desa Demangrejo dapat menerima dana zakat.
3. Bagi organisasi pengelola zakat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan program produktif dalam pemberdayaan zakat dan evaluasi program yang sedang berjalan.
4. 4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi lain untuk Indeks Desa Zakat..

E. Definisi Operasional

Agar lebih memudahkan dan menghindari perbedaan pemahaman pembaca tentang arti dan tujuan judul artikel ini, maka penulis menjelaskan judul artikel ini dengan jelas sebagai berikut:

1. Implementasi

Artinya, implementasi atau penerapan, atau dapat diartikan sebagai tindakan atau implementasi dari suatu rencana yang disusun secara cermat dan rinci.

2. Indeks Desa Zakat

Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kondisi desa, sehingga dapat dikatakan layak atau tidak layak untuk mendapatkan dana zakat. Komponen Indeks Desa Zakat meliputi lima dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dimensi sosial dan kemanusiaan dan dimensi dakwah.

F. Sistematis Penulisan

Untuk memberikan gambaran terkait penelitian ini, maka akan diuraikan terlebih dahulu sistematika penulisan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pada bab pendahuluan berisi beberapa sub tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah yang berisi beberapa pertanyaan yang akan dipecahkan, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan, definisi operasional serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI: Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan acuan pada penelitian ini serta kerangka teori yang mendukung penelitian ini seperti zakat, desa, indeks desa zakat,

zakat community development, pendayagunaan dana zakat, dan kemiskinan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN: Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber pengumpulan data, metode pengumpulan data, analisis data, komponen penyusunan indeks desa zakat, perhitungan indeks desa zakat, pembobotan indeks desa zakat.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya terkait status desa Demangrejo dalam menerima bantuan dana zakat menggunakan metode indeks desa zakat.

BAB V PENUTUP: pada bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran dan rekomendasi untuk pihak pihak terkait.